



**LAPORAN**  
**LOKAKARYA KAKAO INDONESIA 2013**  
**DALAM RANGKA PERINGATAN HARI KAKAO INDONESIA 2013**  
**Jakarta, 18 September 2013**

**Latar Belakang**

Indonesia sebagai produsen kakao terbesar ketiga dunia setelah Pantai Gading dan Ghana, dengan kondisi politik ekonomi yang cukup stabil, memosisikan Indonesia berpeluang besar dalam memasok kebutuhan bahan baku baik untuk pasar domestik maupun global. Dengan kebangkitan dan berkembangnya kapasitas pengolahan industri kakao nasional dan masuknya beberapa investor asing ke Indonesia di sektor kakao, maka keberlanjutan kakao Indonesia baik dari sudut produktivitas dan mutu, tidak bisa ditawarkan lagi, sehingga diperlukan kiat-kiat/terobosan untuk mengupayakan keberlanjutan kakao Indonesia.

Dalam kurun waktu tiga tahun belakangan ini, grinding kakao Indonesia menunjukkan peningkatan yang signifikan, yaitu dari 130,000 ton ditahun 2009/2010 menjadi 265,000 ton ditahun 2011/2012. Peningkatan tersebut sejalan dengan peningkatan volume ekspor dan produk jadi dari 16% di tahun 2009 menjadi 54% di tahun 2012. Disisi lain ada tendensi sedikit penurunan produksi kakao yang antara lain disebabkan oleh umur tanaman yang sudah menua, dibarengi oleh menuanya umur produsen/petani kakao, serangan hama dan penyakit, menurunnya tingkat kesuburan tanah, kurang



tertariknya generasi penerus untuk menjadi petani kakao, dan persaingan penggunaan lahan untuk budidaya kakao dan komoditas lainnya.

Guna mencari solusi/terobosan untuk mewujudkan keberlanjutan kakao baik dari sisi produksi maupun mutu, Pemerintah cq. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Perdagangan, bersama Dewan Kakao Indonesia dan stakeholder kakao menyelenggarakan Lokakarya Kakao Indonesia dengan tema: “Menuju Kakao Indonesia Berkelanjutan”, yang dilaksanakan dalam rangka Peringatan Hari Kakao Indonesia ke satu.

### **Tujuan Lokakarya**

- Mendiskusikan masukan/pandangan berbagai stakeholder kakao dalam mewujudkan Kakao Indonesia yang berkelanjutan.
- Menciptakan dan memperkuat “networking” antar stakeholder kakao.
- Mewujudkan kerjasama antar stakeholder kakao dalam upaya menuju Kakao Indonesia yang berkelanjutan.

### **Peserta Lokakarya**

- Petani, pedagang, pabrikan dan industri kakao, peneliti, akademisi, dan pemerhati kakao.
- Pemerintah, pemangku kebijakan.
- Asosiasi, pelaku bisnis disektor kakao, dan organisasi terkait.





## Dasar Penyelenggaraan

1. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 3470/Kpts/PD.320/10/2012, yang menetapkan bahwa tanggal 16 September 2013 sebagai Hari Nasional Kakao Indonesia, yang akan diperingati setiap tahunnya.
2. Pencanangan Hari Kakao Indonesia oleh Menko Bidang Perekonomian pada tanggal 12 Oktober 2012, di Ball Room Hotel Borobudur
3. SK Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Sumber Hayati Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Nomor KEP-23/D.II.M.EKON/09/2012.

## Pelaksanaan Lokakarya

Lokakarya Kakao Indonesia dengan Tema “Peningkatan Produktivitas dan Kualitas Menuju Kakao Indonesia Berkelanjutan” dilaksanakan pada tanggal 18 September 2013, bertempat di New Wave Hall lantai-4 Taman Anggrek Mall, Jalan S. Parman Kav. 21, Jakarta Barat.

Lokakarya ini dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Kakao Indonesia yang semestinya jatuh pada tanggal 16 September 2013, namun dikarenakan satu dan lain hal baru dapat dilaksanakan pada tanggal 18 September 2013. Dalam memeriahkan peringatan acara Hari Kakao Indonesia tersebut juga dilaksanakan Pameran Promosi Kakao dan Cokelat





Indonesia yang diikuti oleh berbagai industri kakao dan coklat di Indonesia dan peserta daerah khususnya sentra produksi kakao.

Lokakarya dihadiri oleh 225 (dua ratus dua puluh lima) peserta, dibuka oleh Wakil Menteri Perdagangan Bapak Dr. Bayu Krisnamurti, dihadiri oleh Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Sumber Hayati Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; Deputi dan Asisten Deputi Lingkup Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; pejabat Eselon I dan Eselon II lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian, Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Bappenas, Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Dinas Perkebunan Provinsi dan Kabupaten khususnya sentra produksi penghasil kakao; Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia, Akademisi, Dewan Kakao Indonesia, Asosiasi Perkakaoan Indonesia (ASKINDO, AIKI, APIKCI, APKAI, FP2SB, AKFI) dan *stakeholder* kakao lainnya, pabrikan dan industri kakao dan coklat serta industri terkait, pelaku usaha dibidang kakao, pemerhati kakao, dan para wartawan dari berbagai media cetak.

Dalam sambutan pembukaan, Wakil Menteri Perdagangan menyampaikan beberapa hal penting antara lain:

1. Program Pengembangan Kakao seperti Gernas Kakao selama ini hanya bersumber dari APBN. Ke depan diharapkan ada sumber dana lain, karena APBN hanya sebagai pengungkit dan dihimbau kepada seluruh





pelaku usaha untuk berperan aktif dalam pengembangan kakao baik untuk aspek *on farm* dan *off farm*

2. Perlu adanya apresiasi terhadap produk kakao yang bermutu baik seperti biji kakao fermentasi, sertifikasi dan indikasi geografis serta kakao organik
3. Perlu dipersiapkan sejak awal *Indonesian Sustainable Cocoa (ISCocoa)* karena hal ini merupakan kepentingan nasional
4. Perlu adanya sinergitas semua pelaku usaha untuk menjadikan pengembangan kakao berkelanjutan.

Peringatan Hari Kakao Indonesia yang merupakan payung dari kegiatan Lokakarya Kakao Indonesia dan Pameran Promosi Kakao dan Cokelat ini bertujuan untuk:

- Membangun citra Indonesia sebagai produsen produk kakao dan produk makanan/minuman berbasis cokelat berkualitas.
- Mendukung pencapaian target Indonesia menjadi produsen kakao terbesar dunia dan memenuhi kebutuhan dalam negeri dan pasar global.
- Mempercepat peningkatan konsumsi cokelat nasional.
- Menumbuhkembangkan kecintaan terhadap produk dalam negeri.
- Mendorong hilirisasi industri kakao dalam negeri dengan peningkatan nilai tambah produk kakao dan cokelat.
- Membantu meningkatkan kesejahteraan petani kakao Indonesia, mengingat 95% perkebunan kakao merupakan perkebunan rakyat.





Dalam menjabarkan tujuan tersebut, salah satu upaya yang dilaksanakan adalah penyelenggaraan Lokakarya Kakao Indonesia yang dikoordinasikan oleh Dewan Kakao Indonesia dan *stakeholder* serta industri kakao terkait, dengan dukungan anggaran dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Pertanian cq Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Perindustrian cq Direktorat Jenderal Industri Agro, serta partisipasi sponsor PT Papandayan Cocoa Industries, Mondelez International, dan Bank Rakyat Indonesia.

## **Materi Lokakarya**

Pada acara tersebut, disampaikan beberapa paparan yaitu:

### **1. “Global Grinding Versus Production”**

Disampaikan oleh Laurent Pipitone, *Director of Economic and Statistic* dari ICCO, dengan pembahas Ir. Mesah Tarigan, Direktur Pemasaran Internasional Ditjen PPHP Kementerian Pertanian; Ir. Faiz Achmad, Direktur Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan, Ditjen Industri Agro Kementerian Perindustrian; Lukas Jasman, BT Cocoa; dan Dr. Soetanto Abdoellah, Ketua Umum Dewan Kakao Indonesia sebagai moderator.

Pokok materi yang disampaikan meliputi *Characteristic of the world cocoa economy, Cocoa prices, Market outlook, Strategic challenges facing the cocoa sector, The World Cocoa Conference.*





Beberapa hal yang disampaikan pada pokok bahasan meliputi:

(i). Produksi biji kakao tahun 2012 mencapai nilai US\$ 10 milyar, dengan nilai “retail” penjualan coklat sebesar US\$ 107 milyar, lebih dari 50% (US\$ 59,9 milyar) dikuasai oleh 6 (enam) pemain besar dunia yaitu Mars Inc. USA (US\$ 16.800 juta), Mondelez International Inc. USA (US\$ 15.480 juta), Nestle Switzerland (US\$ 12.808 juta), Hershey Foods USA (US\$ 6.460 juta), Ferrero Italy (US\$ 5.627 juta), Chocoladerfabriken Lindt & Springli AG Switzerland (US\$ 2.791 juta).

Produksi kakao dunia tahun 2012 sebesar 3,946 juta ton, Afrika sebagai penghasil terbesar (72% atau 2,8 juta ton), Amerika Latin menghasilkan 15% (605 ribu ton), Asia dan Oceania 13% (510 ribu ton). Dari jumlah tersebut Indonesia menduduki peringkat 3 dunia setelah Pantai Gading dan Ghana. Tercatat 12 (dua belas) negara produsen kakao utama yaitu Pantai Gading (1.460.000 ton), Ghana

(850.000 ton), Indonesia (425.000 ton), Nigeria (225.000 ton), Cameroon (225.000 ton), Brazil (185.000 ton), Equador (185.000 ton), Peru (65.000 ton), Dominican Republic (60.000 ton), Columbia (46.000 ton), Papua New Guinea (45.000 ton), dan Mexico (25.000 ton).

*Grinding* kakao dunia tahun 2012/2013 mencapai 4,010 juta ton, didominasi oleh negara-negara Eropa dan Rusia sebesar 39% (1,561 juta ton), Amerika 21% (858.000 ton), Asia dan Oceania 21% (856.000





ton), dan Afrika 18% (735,000 ton). Negara-negara penghasil produk kakao olahan utama tersebut adalah Nederland (530 ribu ton), Pantai Gading (450 ribu ton), Amerika (405 ribu ton), Jerman (395 ribu ton), Malaysia (290 ribu ton), Indonesia (270 ribu ton), Brazil (235 ribu ton), Ghana (215 ribu ton), Perancis (138 ribu ton), Spanyol (90 ribu ton), dan Singapore (78 ribu ton).

Konsumsi kakao terbesar dunia adalah Eropa (EU 37%, di luar EU 10%), Amerika (Amerika Utara 24%, Amerika Latin 10%), Asia dan Oceania (10%), dan Afrika (4%). Konsumsi per kapita (kg/kapita/th) terbesar adalah Switzerland sebesar 5,74; diikuti Belgia 5,56; Jerman 4,03; UK 3,52; Perancis 3,43; Amerika 2,45; Rusia 1,43; Jepang 1,25; Brazil 1,03; Ghana 0,55; Pantai Gading 0,48; Nigeria 0,12; Indonesia 0,08; China 0,04; dan India 0,04.

Kebutuhan kakao dunia diproyeksikan semakin meningkat, tahun 2014/2015 diperkirakan mencapai 4 juta ton dan akan meningkat terus sampai tahun 2017/2018 menjadi 4,4 juta ton. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut perlu ditempuh strategi yang tepat dengan memperhatikan bahwa (i) 95% kakao dunia diproduksi oleh petani kecil, hanya sebagian kecil saja oleh perkebunan besar; (ii) Kurangnya akses bank untuk kredit petani; (iii) Semakin menuanya usia petani kakao yang tidak diimbangi oleh generasi muda yang tertarik dengan kakao; (iv) Semakin menuanya pohon-pohon kakao; (v) Penghasilan yang masih rendah di tingkat petani yang hidup mendekati garis







kemiskinan; (vi) Teknologi penanganan kebun yang diterapkan petani belum memadai; (vii) Menurunnya kesuburan tanah karena tidak diimbangi dengan input yang cukup; (viii) Menurunnya produksi akibat serangan hama dan penyakit; (ix) Kesulitan petani untuk beradaptasi dengan teknologi dan peraturan-peraturan baru; (x) Dampak yang ditimbulkan oleh kerusakan lingkungan dan perubahan iklim; (xi) Kurangnya informasi pasar dan transparansi; (xii) Kepedulian terhadap standar sosial.

## 2. **“Kebijakan Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao Dalam Mendukung Hilirisasi dan Peningkatan Pendapatan Petani”**

Disampaikan oleh Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, yang diwakili oleh Ir. Azwar AB, Direktur Tanaman Rempah dan Penyegar; dengan pembahas Dr. Teguh Wahyudi, Direktur Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia; Ir. Achmad Manggabarani, MM , Ketua SP2SB; Andi Siti Asmayanti, Mondelez International; dan Prof. Dr. Bustanul Arifin, Peneliti INDEF sebagai moderator.

Pokok materi yang disampaikan meliputi Pentingnya kakao sebagai penghasil devisa di sector perkebunan; Kondisi perkakaoan Indonesia saat ini; Berbagai masalah yang dihadapi; Prospek dan potensi pengembangan kakao Indonesia; Kebijakan dan Strategi Pengembangan Kakao Indonesia; dan Gernas Kakao.

Beberapa hal penting yang disampaikan adalah :





- Perlu adanya persepsi yang sama tentang data produksi kakao nasional antara pemerintah dan industri kakao, karena hal ini akan menjadi dasar dalam penentuan kebijakan perkakaoan nasional.
- Luas areal kakao cenderung meningkat namun tidak diikuti dengan peningkatan produksi karena sekitar 94% merupakan perkebunan rakyat yang pengelolaannya belum sesuai standar teknis, sehingga perlu menjadi perhatian para pelaku usaha kakao.
- Peluang Indonesia untuk menjadi produsen kakao terbesar dunia sangat dimungkinkan karena adanya dukungan tanah dan iklim yang sesuai, teknologi, minat petani, SDM, dan institusi yang handal.
- Untuk menjadikan produsen kakao terbesar dunia perlu dukungan semua pihak seperti Pemerintah Pusat, Daerah, Perbankan, Pelaku usaha, Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian serta Kemitraan antara petani/kelompok tani dengan pelaku usaha.
- Dalam pelaksanaan Gernas Kakao, pemerintah pusat melalui APBN dan petani sudah berperan secara optimum, sedangkan sebagian besar pemerintah daerah dan pelaku usaha belum berperan optimum. Pemerintah Daerah dan para pemangku kepentingan lainnya diharapkan membantu melakukan pemeliharaan kebun kakao yang telah diperbaiki oleh program Gernas Kakao.



Kementerian Koordinator  
Bidang Perekonomian RI



Kementerian  
Perindustrian  
REPUBLIK INDONESIA



MINISTRY OF TRADE





- Gernas kakao telah memberikan efek positif terhadap produksi kakao nasional karena meningkatnya produksi di wilayah Gernas Kakao. Peningkatan produksi ini akan terus berlangsung seiring dengan peningkatan umur tanaman, namun bila tidak dilakukan pemeliharaan, peningkatan produksi tersebut tidak akan tercapai.
- Pengembangan kakao ke depan diarahkan dengan menggunakan Model Kawasan Agribisnis Kakao. Kawasan ini mengintegrasikan aspek on farm sampai dengan off-farm.
- Kebijakan Kakao berkelanjutan difokuskan pada aspek ekonomi, sosial, lingkungan serta keamanan pangan.
- Penerapan pengembangan kakao berkelanjutan berpedoman pada GAP, SNI, dan SUPRADIN (Sistem Usaha Tani Perkebunan Rakyat Diversifikasi Integratif). Pengembangan kakao berkelanjutan didasarkan pada UU 18/2004 tentang Perkebunan.

3. **“Menuju Kakao Indonesia Berkelanjutan (peluang, tantangan dan langkah konkrit)”**. Disampaikan oleh Dr. Misnawi Jati, Kepala Bidang Penelitian Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia, dengan pembahas Ir. Azwar AB, Direktur Tanaman Rempah dan Penyegar, Ditjen Perkebunan Kementerian Pertanian; Ir. Musdhalifah Machmud, Asdep Perkebunan & Hortikultura, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; Sony Satari, Ketua APIKCI; dan Ir. Achmad Manggabarani, Ketua FP2SB sebagai moderator.





Pokok materi yang disampaikan adalah Arti penting keberlanjutan komoditas kakao; Dampak lingkungan terhadap keberlanjutan komoditas kakao; Masalah utama yang dihadapi menuju keberlanjutan; Peningkatan produktivitas kakao dalam mendukung keberlanjutan hilirisasi kakao; Peluang dan tantangan menuju keberlanjutan komoditas kakao.

Beberapa hal penting yang disampaikan adalah:

- Komitmen yang tinggi dari semua pelaku bisnis kakao (petani/pekebun, koperasi, pedagang, eksportir, industri, lembaga penelitian, dan pemerintah) akan dapat mengangkat perkakaoan nasional menjadi tangguh di pasar domestik dan global yang mampu mensejahterakan petani dan masyarakat.
- Pertanian berkelanjutan adalah pertanian yang mampu menyatukan sistem dalam memproduksi jasad hidup (tumbuhan maupun binatang) untuk jangka panjang dan dapat mencukupi kebutuhan pangan, serta meningkatkan kualitas lingkungan hidup serta sumber daya alam. Keberlanjutan harus mampu memanfaatkan seefisien mungkin penggunaan sumber daya alam yang tidak terbarukan maupun yang dapat diperbarui, serta memiliki kemampuan untuk menggabungkan sumber-sumber yang cocok bagi siklus biologi secara alami yang dapat dikontrol. Keberlanjutan juga harus mampu mewujudkan kelanjutan penanganan kebun serta mampu memperbaiki kehidupan petani dan masyarakat secara luas.



Kementerian Koordinator  
Bidang Perekonomian RI



Kementerian  
Perindustrian  
REPUBLIK INDONESIA



KEMENTERIAN  
PERDAGANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
MINISTRY OF TRADE



GAPMMI



- Untuk menjaga keberlanjutan agribisnis kakao, dua hal yang harus menjadi perhatian yaitu (i) Daya saing terhadap komoditas lainnya, harga, rantai pasokan dan minat generasi muda berkebun kakao; (ii) Permintaan pasar terhadap sertifikasi, yang dipandang masih membingungkan petani, biayanya mahal, dan kebanyakan petani belum memahami arti sertifikasi.
- Agribisnis kakao bukan hanya bertani kakao, namun perlu dipastikan bahwa ada kondisi lingkungan yang mendukung sehingga program tersebut dapat dilaksanakan (*feasible*), adanya komitmen yang tinggi (*responsible*) dari *stakeholder* kakao dan semua pihak terkait (petani, industri/swasta, lembaga penelitian dan pemerintah), serta mampu mewujudkan kondisi yang ramah lingkungan secara ekonomi, ekologi, dan sosial.
- Masalah utama yang dihadapi dalam agribisnis kakao di tingkat hulu adalah produktivitas rendah; pada umumnya karena umur tanaman yang sudah tua, serangan hama penggerek buah kakao, serangan penyakit VSD dan busuk buah *Phytophthora*, perlakuan agronomi yang kurang optimum, dan skala usaha yang masih terbatas/kecil. Di tingkat hilir, masalah yang dihadapi adalah mutu rendah, fermentasi yang belum dilaksanakan dengan baik, kadar air yang masih tinggi, tumbuhnya jamur dan kotoran, dan lemahnya kelembagaan petani.



- Keberlanjutan atau *sustainability* kakao, tidak hanya cukup digaungkan sebagai suatu tuntutan untuk memenuhi kriteria – kriteria standar seperti pemenuhan aspek GAP-GMP yang ramah lingkungan, bertanggungjawab secara sosial dan profit secara ekonomi semata, tetapi harus secara nyata memberikan keuntungan yang adil bagi para pelaku di masa kini dan mendatang.
- Konsep *sustainability* dan *green economy* hanya akan berjalan bila didasari dengan pembagian keuntungan yang adil dan memadai antar semua pelaku.
- Bermitra dengan prinsip saling menguntungkan, saling percaya, dan saling membesarkan merupakan salah satu kunci keberhasilan *sustainability*.
- Semua ini bisa dicapai apabila semua pemangku kepentingan (petani, pedagang, pemerintah, industri/swasta dan LSM) bersama-sama menyatukan langkah untuk kemajuan bersama meminimalkan ego-ego kepentingan masing-masing pihak.

#### 4. “Penguatan Kelembagaan Petani Dalam Mendukung Hilirisasi”

Disampaikan oleh Ir. Bambang, Ketua LEM (Lembaga Ekonomi Masyarakat) Sejahtera dari Sulawesi Tenggara, dengan pembahas Ir. Arif Zamroni SH, MH, Ketua Asosiasi Petani Kakao Indonesia (APKAI); A. Wayan Danu, Direktur PT Core Indonesia; Dian Nugraha, Kanwil Bank Indonesia Sulawesi Tenggara; dengan Moderator H. Samsudin Said, Ketua Asosiasi Kakao Fermentasi Indonesia (AKFI).





Pokok-pokok yang disampaikan adalah:

- Secara nasional, pulau Sulawesi merupakan produsen utama kakao di Indonesia, dengan persentase luas areal sebesar 60,57% dan produksi sebesar 67,61%. Areal kakao Sulawesi Tenggara menduduki urutan kedua setelah Sulawesi Selatan, dan produksi menduduki urutan ke tiga setelah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah.
- Posisi nomor dua tersebut belum dapat dinikmati sepenuhnya oleh petani kakao dikarenakan produktivitas yang masih rendah. Kondisi tersebut antara lain disebabkan sebagian besar petani belum menerapkan budidaya yang benar seperti pemupukan, pemangkasan, dan pembuatan rorak. Penyebab utamanya adalah keterbatasan modal, keterbatasan tenaga kerja dikarenakan banyak tenaga muda yang lebih memilih mencari peluang kerja di kota, kepemilikan lahan yang luas (banyak petani yang memiliki kebun lebih dari 5 ha), dan sebagian besar hasil kakao masih dalam bentuk biji asalan.
- Salah satu yang cukup menjanjikan dalam perkembangan kakao di Sulawesi Tenggara adalah hadirnya PT Kalla Kakao Industri (KKI), di kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Konawe Selatan dengan investasi sebesar Rp. 350 milyar untuk pendirian pabrik pengolahan biji kakao dengan kapasitas 35.000 ton yang menurut rencana akan beroperasi pada akhir tahun 2013. Produk yang dihasilkan berupa bubuk cokelat, *cocoa liquor*, dan *cocoa butter* yang akan diekspor ke Timur Tengah, China, India, Australia, dan



Eropa. Kehadiran pabrik tersebut akan menjadikan harapan bagi petani kakao Sulawesi Tenggara untuk memperbaiki tingkat hidupnya dengan pertimbangan bahwa:

- Lokasi pabrik berdekatan dengan kebun sehingga biaya transportasi murah, berdampak kepada peningkatan harga di petani.
  - Terbuka peluang kerja bagi tenaga muda di sektor kakao, sehingga mengurangi urbanisasi tenaga muda ke kota.
  - Mendorong petani untuk memproduksi biji fermentasi, yang harga jualnya lebih tinggi dari biji asalan.
  - Adanya bantuan 2 (dua ) buah gudang oleh Kementerian Perdagangan melalui Bappebti untuk fasilitas kegiatan resi gudang di Kabupaten Kolaka Timur dan Konawe Selatan, yang akan mendukung petani untuk mendapatkan harga jual biji kakao lebih baik.
- Kelembagaan petani merupakan salah satu faktor utama dalam pengembangan perkokaoan Indonesia. Kemandirian dan penguatan kelembagaan petani sangat penting karena merupakan kekuatan dalam menjauhkan petani dari sistim ijon, mendorong petani untuk mampu berinteraksi dengan perbankan dan pasar, serta membuka petani untuk berpeluang menjadi penentu harga.
- Dalam hal perbankan masih terdapat berbagai kendala yang dihadapi petani antara lain:
- (i). Risiko *default* kredit di sektor pertanian sangat tinggi disebabkan pengaruh alam yang tidak menentu. Hal tersebut





membuat perbankan sering menghindari sektor pertanian, khususnya kakao yang lebih dari 90% adalah perkebunan rakyat.

(ii). Keterbatasan jumlah kantor bank dan pegawainya di daerah, serta lokasi petani yang terlalu jauh dari lokasi bank menyebabkan biaya tinggi bagi perbankan dalam penyaluran dan pemantauan kredit.

(iii). Sebagian besar petani masih kurang memahami proses pengambilan kredit bank, proses kredit yang rumit serta memerlukan waktu dan persyaratan, sehingga petani lebih suka meminjam kepada tengkulak atau pihak lainnya di luar bank dengan bunga yang lebih tinggi.

(iv). Petani tidak memiliki agunan.

- Dalam menghadapi permasalahan yang dihadapi petani tersebut, penguatan dan pemberdayaan kelembagaan petani telah menjadi program utama Pemerintah Propinsi Sulawesi Tenggara melalui pembentukan LEM Sejahtera, yang pembentukannya diinisiasi oleh Dinas Perkebunan dan Hortikultura Propinsi Sulawesi Tenggara. Saat ini sudah terbentuk 62 LEM Sejahtera di berbagai kabupaten di Sulawesi Tenggara dengan komoditas utama lebih dari 90% adalah kakao.
- LEM Sejahtera merupakan lembaga dari, oleh, dan untuk masyarakat yang tidak terikat dengan struktur resmi pemerintahan. Memiliki nama sesuai dengan nama desa tempat lembaga tersebut berlokasi. Kepengurusan terdiri dari pengurus inti (ketua, sekretaris dan bendahara), staf, badan pengawas,





pengurus tingkat dusun dan pengelola badan usaha, yang semuanya terdiri dari petani dan masyarakat setempat. Pengurus inti tidak boleh berasal dari perangkat desa, PNS, TNI atau Polri.

- LEM Sejahtera adalah salah satu model penyempurnaan kelembagaan petani guna mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan petani. Lembaga ini diharapkan sebagai lembaga masyarakat tertinggi di tingkat desa, menjadi pintu gerbang untuk mensinergikan berbagai program dan proyek/kegiatan di desanya.
- Dalam rangka mendukung hilirisasi kakao dan meningkatkan konsumen coklat dalam negeri, lembaga ini membangun jejaring antar desa, kecamatan, dan kabupaten, menjalin kerjasama dengan mitra terkait dan bertekad untuk meningkatkan produksi sesuai persyaratan mutu yang dibutuhkan industri. Di samping sebagai pemasok bahan baku, lembaga ini juga akan merintis kerjasama dengan industri untuk mengembangkan usaha pengolahan produk kakao skala kecil di pedesaan.
- Melalui LEM Sejahtera, para petani kakao diarahkan untuk meningkatkan produktivitas kebun dan mutu biji kakao, serta menangani proses pasca panen dengan baik. Industri pengolahan di tingkat desa dikelola oleh unit usaha di bawah manajemen LEM Sejahtera yang merekrut tenaga kerja terpilih dengan tugas melaksanakan kegiatan antara lain (i)melakukan pembelian biji kakao basah dari petani yang tidak mau melakukan fermentasi, untuk ditangani lebih lanjut (fermentasi, pengeringan, sortasi, *grading* dan pengemasan; (ii)mengolah limbah kakao (kulit buah,





buah yang terserang penyakit, pangkasan kakao dan pohon pelindung) menjadi pakan ternak dan pupuk organik; (iii)melakukan pembelian biji kakao fermentasi dari anggotanya untuk penanganan tindak lanjut (pengeringan, sortasi, *grading* dan pengemasan); (iv)bekerjasama dengan lembaga lain dalam satu wadah koperasi LEM Sejahtera untuk memasarkan biji kakao kepada mitra; (v)menjalin kerjasama dengan mitra industri, antara lain membeli *powder* untuk diolah menjadi berbagai produk hilir.

- LEM Sejahtera secara umum memiliki persyaratan yaitu yang dapat menjadi anggota adalah kepala keluarga, membayar simpanan pokok Rp 1 juta dan simpanan wajib sebesar Rp 10 ribu/bulan. Minimal 1 tahun sekali melaksanakan Rapat Anggota Tahunan, dan dapat melaksanakan berbagai kegiatan usaha antara lain simpan pinjam yang bertujuan untuk penyediaan dana sewaktu-waktu ada anggota yang memerlukan, jual beli saprodi dalam memenuhi kebutuhan anggotanya, jual beli hasil bumi/kakao dengan tujuan membeli kakao anggota dengan harga terbaik.
- LEM Sejahtera menjadi penghubung antara anggota/petani dengan berbagai pihak. Pemerintah (Pusat, Propinsi, dan BI) memberikan bantuan langsung kepada LEM Sejahtera, sehingga tidak perlu lagi membentuk badan baru dalam penyaluran bantuan. LEM Sejahtera melakukan hubungan bisnis dengan pihak swasta seperti penyediaan saprodi murah dan berkualitas bagi anggotanya, menjual hasil bumi petani dengan harga maksimum, serta menyediakan modal bagi anggota dengan dana berasal dari LEM





Sejahtera atau bank. Dengan cara tersebut, petani/masyarakat/anggota LEM Sejahtera mampu terhindar dari tengkulak dan ijon.

- Sejak tahun 2010, LEM Sejahtera telah melaksanakan program kerja di sektor kakao meliputi pembangunan demplot pupuk organik, bantuan sarana dan prasarana kepada anggotanya, pelatihan manajemen keuangan dan kelembagaan, pelatihan komputer, pendampingan dan monitoring, partisipasi pada berbagai seminar dan lokakarya. Dengan bukti kemandirian dan kepercayaan yang ditunjukkan oleh lembaga tersebut, maka sampai dengan tahun 2013 kontribusi anggaran Kantor Perwakilan BI Propinsi Sulawesi Tenggara untuk program kerja klaster kakao yang disalurkan melalui LEM Sejahtera mencapai Rp 717 juta.
- Berkat ketekunan lembaga tersebut dalam memajukan anggotanya untuk menjadi petani kakao yang mandiri dalam menangani bisnis kakaonya, LEM Sejahtera Tinete dan Iwoi Menggura telah berhasil mendapat pinjaman kredit modal kerja kepada BPD Sulawesi Tenggara masing-masing sebesar Rp 250 juta.
- Keberhasilan Propinsi Sulawesi Tenggara dalam memajukan/mengangkat dan memberdayakan petani kakaonya telah dibuktikan dengan penghargaan yang diberikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia kepada LEM Sejahtera Andomesinggo dan Tinete sebagai Gabungan Kelompok Tani Andalan Sulawesi Tenggara pada tahun 2012 dan 2013.





- Dari 62 unit LEM Sejahtera yang terbentuk hingga tahun 2013, masih sedikit (kurang dari 10 unit) yang dapat berfungsi dengan baik sebagai lembaga bisnis. Hal tersebut disebabkan perbedaan perlakuan yang didapat oleh LEM Sejahtera yang berdiri pertama/paling awal dengan LEM Sejahtera yang terbentuk belakangan, seperti fasilitas bantuan permodalan, sarana (saprodi, gudang, mesin penunjang), dan pelatihan secara intensif untuk pengurus. Kondisi tersebut menyebabkan anggota enggan untuk menyetorkan simpanan pokok, masyarakat enggan menjadi anggota, masyarakat cenderung menjadi anggota lembaga petani lainnya yang lebih memiliki kegiatan dan mendapatkan bantuan. Hal tersebut perlu menjadi perhatian bersama dan diperlukan komitmen untuk membangkitkan dan memperbaiki kekurangan-kekurangan.
- Solusi yang diperlukan:
  - (i). Pemberian bantuan teknis, permodalan, sarana dan prasarana kepada LEM Sejahtera agar dapat berfungsi dengan baik.
  - (ii). Perlunya kelanjutan program pembangunan kakao tahun 2014 dan selanjutnya untuk Sulawesi Tenggara dengan memperhatikan masih banyak tanaman yang perlu direhabilitasi karena sudah tidak produktif lagi.
  - (iii). Perbaikan infrastruktur jalan yang saat ini sudah rusak berat di sentra produksi kakao, yang berdampak kepada tingginya biaya transportasi.



(iv). Perlu ada koordinasi dan sinergi antara Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten dalam upaya menghindari tumpang tindih program.

(vi). Perlu peningkatan jumlah petani yang menerima program sertifikasi tanah.

5. **“Rantai Tata Niaga Kakao”** disampaikan oleh Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, dengan pembahas Ir. Zulhefi Sikumbang, Ketua ASKINDO; Piter Jasman, Ketua AIKI; Wisman Djaya, Direktur Nestle; dan Dr. Deddy Saleh, Komisaris Utama JFX sebagai moderator.

Pokok bahasan yang disampaikan meliputi (i) Kebijakan tataniaga komoditas; (ii) Peningkatan daya saing produk nasional; (iii) Enam pilar kunci pengembangan logistik nasional; (iv) Profil potensi dan tantangan kakao.

Beberapa hal penting yang digarisbawahi adalah:

- Kebijakan tataniaga komoditas, dibedakan untuk tiga komponen besar yaitu:

(i). Komoditas yang menganut mekanisme pasar, dimana harga dan ketersediaan barang tergantung pada *supply-demand* (untuk kategori barang bebas), antara lain komoditas kakao.

(ii). Komoditas yang peredarannya diawasi/diatur, dimana komoditas tersebut masuk golongan yang menyangkut hajat hidup





orang banyak, dapat mempengaruhi perekonomian nasional dan keseimbangan *supply-demand*, barang yang disubsidi oleh pemerintah, barang yang diselundupkan dan berpengaruh terhadap perlindungan produsen didalam negeri. Contoh: gula, pupuk, dan beras.

(iii). Komoditas yang peredarannya dilarang, yaitu barang-barang yang sifatnya berbahaya baik dari aspek kesehatan, kenyamanan, keamanan, keselamatan dan ketenteraman bangsa, seperti bahan peledak, narkotik, limbah B3.

- Dalam rangka meningkatkan sistim logistik nasional sebagai salah satu prasarana dalam meningkatkan daya saing produk nasional, pemerintah telah menetapkan cetak biru Pengembangan Sistim Logistik Nasional melalui Perpres Nomor 26 tahun 2012 yang digunakan sebagai panduan/pedoman bagi pemangku kepentingan.
- Biaya logistik nasional tahun 2011 mencapai 24.46% dari PDB dengan sumbangan terbesar dari biaya transportasi (11.63%). Untuk menekan biaya tersebut perlu diwujudkan kelancaran arus distribusi barang yang efektif dan efisien melalui pembenahan dan pembangunan sarana distribusi. Untuk mewujudkan upaya tersebut Kementerian Perdagangan telah merevitalisasi 461 unit pasar tradisional (4,82%) dari 9.559 total pasar tradisional di seluruh Indonesia.
- Kementerian Perdagangan juga mendorong pembentukan/pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus dan pelabuhan-pelabuhan internasional, serta pembangunan Pusat





Distribusi Regional (PDR) dan Pusat Distribusi Propinsi (PDP) yang dapat berfungsi sebagai simpul-simpul logistik nasional.

- Enam pilar kunci pengembangan sistim logistik nasional yaitu (i) Regulasi, peraturan dan perundangan; (ii) Manajemen sumber daya manusia; (iii) Teknologi informasi dan komunikasi; (iv) Pelaku dan penjelia jasa logistik; (v) Infrastruktur transportasi, dan (vi) Komoditas sebagai penggerak utama.
- Dari segi potensi, komoditas kakao merupakan sumber kehidupan bagi 1,4 juta keluarga petani, dan sumber devisa sebesar US\$ 1,053 milyar pada tahun 2012. Kakao Indonesia memiliki karakteristik yang tidak dimiliki oleh negara lain yaitu *melting point* yang tinggi sehingga cokelat *bar* tidak meleleh pada suhu ruangan, rasa *fruity* yang sangat cocok untuk aroma *blending*, dan memiliki kandungan asam lemak bebas (FFA) yang rendah.
- Kebijakan yang menonjol dalam membangun perkakaoan Indonesia adalah pembangunan hulu dalam upaya peningkatan produktifitas dan mutu kakao. Kebijakan ini bertujuan meningkatkan pendapatan petani sekaligus memenuhi kebutuhan bahan baku yang berkualitas dan berkesinambungan dalam mendukung hilirisasi kakao. Implementasi kebijakan ini berupa program Gernas Kakao yang dimulai sejak tahun 2009 dan berakhir 2013, kemudian dilanjutkan dengan program-program pengembangan lain sebagai kelanjutan program Gernas Kakao. Kebijakan lain yang sangat berperan adalah penerapan bea keluar bagi biji kakao yang diekspor, yang diterapkan sejak tanggal 1 April







tahun 2010 berupa Peraturan Menteri Keuangan nomor 67 tahun 2010 tentang penetapan barang-barang yang terkena bea keluar dimana biji kakao termasuk di dalamnya. Kebijakan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja industri kakao di dalam negeri (hilirisasi) yang juga mendorong masuknya investor asing di sektor kakao ke Indonesia. Kebijakan BK ini dinilai cukup berhasil karena merangsang pertumbuhan industri pengolahan kakao di dalam negeri dengan peningkatan kapasitas produksi sebesar 87%.

- Strategi meningkatkan pasokan dan kelancaran arus penyaluran, serta daya saing produk nasional, mencakup 3 (tiga) hal yaitu:
  - (i). Bagi komoditas pokok dan strategis, sasaran yang harus dipenuhi adalah kepastian ketersediaan bahan baku, kemudahan dalam mendapatkan barang, dan harga yang stabil serta terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Strategi tersebut perlu dibarengi oleh pembangunan sistem distribusi nasional, peningkatan ketersediaan pasokan nasional, stabilitas harga dan penurunan disparitas harga komoditas pokok dan strategis.
  - (ii). Bagi komoditas unggulan ekspor, sasaran yang harus dipenuhi adalah meningkatnya daya saing dan volume ekspor komoditas berbasis agro, perikanan, manufaktur dan komoditas unggulan ekspor lainnya di pasar dunia. Program yang dilaksanakan dalam menunjang strategi tersebut adalah meningkatkan kinerja sistem rantai pasok komoditas unggulan ekspor, meningkatkan sistem rantai nilai dan daya saing produk unggulan ekspor.





(iii). Bagi komoditas bebas (*free market*), sasaran yang dituju adalah peningkatan daya saing komoditas bebas dan pelaku usahanya di pasar domestik, regional, dan global melalui program peningkatan perlindungan konsumen, peningkatan persaingan usaha yang sehat, dan peningkatan daya saing produk nasional.

## 6. “Sertifikasi Kakao Berkelanjutan”

Disampaikan oleh Direktur Mutu dan Standardisasi Ditjen PPHP, Kementerian Pertanian yang diwakili oleh Ir. Andy Arnida Massusungan, MSc; dengan pembahas Peter Sprang dari *Rainforest Alliance*; Ir. Winaryo dari *Control Union*; dan Ir. Husniyati, Direktur PPMB, Kementerian Perdagangan sebagai moderator.

Pokok bahasan yang disampaikan adalah (i) Kakao sebagai komoditas strategis dan unggulan ekspor; (ii) Kondisi perkakaoan Indonesia; (iii) Permasalahan yang dihadapi dan solusinya; (iv) Kebijakan pemerintah dalam mendukung peningkatan mutu biji kakao; (v) Draft Permentan tentang Sistem Kakao Berkelanjutan Indonesia (*ISCocoa*).

Hal-hal penting yang digarisbawahi adalah:

Sebagai komoditas strategis, kakao sangat berperan dalam perekonomian Indonesia, yaitu merupakan komoditas andalan ekspor dan sumber devisa; merupakan sumber pendapatan petani dan lapangan kerja masyarakat; sebagai pemasok bahan baku industri pengolahan kakao; mendorong pusat-pusat pertumbuhan





perekonomian di daerah; dan berperan dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Hampir seluruh bagian tanaman kakao dapat dimanfaatkan (biji, kulit buah, dan pulp), baik untuk pangan, pakan, dan sarana produksi (pupuk, biogas) dll. Kakao mengandung zat yang bermanfaat bagi tubuh (karbohidrat, lemak, protein, antioksidan, dll.) yang dapat mencegah dan meringankan penyakit kanker, *stroke* dan jantung.

Sebagian besar kebun kakao di Indonesia adalah perkebunan rakyat. Statistik kakao Indonesia tahun 2012 menunjukkan total luas lahan penghasil kakao adalah 1.732.954 ha, produksi 936.266 ton, produktivitas 820 kg/ha, dengan lima propinsi penghasil kakao terbesar di Indonesia adalah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, dan Sumatera Utara. Ekspor biji kakao Indonesia tahun 2012 tercatat 163.501 ton (BPS). Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, permintaan kakao dunia meningkat terus yaitu tahun 2008 sebesar 3.537,000 ton meningkat menjadi 3.987.000 ton ditahun 2012, dengan pengguna terbesar adalah Eropa, Amerika, Asia, dan Afrika (ICCO).

Selama kurun waktu lima tahun (2008-2012), harga kakao dunia menunjukkan *trend* meningkat yaitu tahun 2008 sebesar 2100 USD/ton meningkat secara signifikan menjadi 3600 USD/ton pada November 2009, kemudian mengalami penurunan menjadi 3000





USD/ton pada bulan Oktober 2010, dan kembali meningkat menjadi 3600 USD/ton pada bulan Februari 2011. Terjadi penurunan secara drastis menjadi 2200 USD/ton pada bulan Oktober 2011, dan pada September 2013 tercatat 2636 USD/ton.

Meskipun kakao Indonesia menduduki peringkat ketiga dunia, namun banyak masalah yang dihadapi, antara lain:

1. Mutu biji kakao Indonesia rendah, dan 80% kakao Indonesia tidak difermentasi.
2. Mutu rendah tersebut berdampak kepada ekspor biji kakao Indonesia dihargai dibawah harga wajar di pasar global, yang berdampak kepada kerugian devisa karena harga jual yang rendah, sekaligus berkurangnya nilai tambah di tingkat petani.
3. Luas areal perkebunan kakao terus meningkat, tidak diimbangi dengan peningkatan produktivitas, menimbulkan pemborosan devisa
4. Kelembagaan petani dan kelembagaan usaha belum mandiri dan optimal, sehingga akses pemasaran, penggunaan teknologi, dan akses bank masih sulit terjangkau petani, dan petani pada posisi tawar yang lemah.
5. Belum optimalnya pengembangan kerjasama kemitraan antara petani (selaku produsen bahan baku) dan industri yang berpihak kepada petani .
6. Lemahnya pengawasan yang dilakukan pemerintah terhadap rantai *supply* kakao, sehingga petani belum pada posisi yang diuntungkan.





Solusi yang dilakukan:

1. Peningkatan mutu biji kakao kering melalui fermentasi, menuju kebijakan Wajib Biji Kakao Fermentasi
2. Peningkatan nilai tambah dengan mengolah biji kakao menjadi bahan setengah jadi dan bahan siap saji
3. Peningkatan kemitraan antara kelompok tani dan industri yang berbasis *win-win benefits* dengan dukungan kemudahan-kemudahan proses perbankan.
4. Membatasi operasional tengkulak dan *trader* asing di daerah yang tidak berpihak kepada petani.
5. Pengawasan ketat yang berpihak kepada petani selaku produsen bahan baku.
6. Komitmen berbagai pihak terhadap sarana dan prasarana, kelembagaan petani yang mandiri, SDM yang kompeten, penerapan sistem jaminan mutu pada Gapoktan kakao, dan penerapan mutu biji kakao sesuai standar.

Upaya-upaya tersebut telah dilaksanakan melalui berbagai kebijakan dan program pemerintah di tingkat hulu seperti Program Gerakan Nasional (GERNAS KAKAO); Peraturan Menteri Pertanian Nomor 51/Permentan/ OT.140/9/2012 tentang Pedoman Penanganan Pasca Panen Kakao; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 20/Permentan O.T 140/2/2010 tentang Sistem Jaminan Mutu Pangan Hasil Pertanian; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 58/Permentan/OI 140/8/2007 tentang Sistem Standardisasi Nasional dibidang Pertanian; Draft Peraturan Menteri Pertanian tentang Persyaratan Mutu dan





Pemasaran Biji Kakao yang saat ini sedang dalam finalisasi; dan konsep penyusunan regulasi tentang *Indonesian Sustainable Cocoa (ISCocoa)* yang saat ini sedang dalam pembahasan.

Kebijakan-kebijakan di tingkat hilir yang sudah dilaksanakan antara lain Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 113/M-IND/PER/10/2009 tentang peta panduan (*road map*) Pengembangan Kluster Industri Kakao; Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 157/M-IND/PER/5/2009 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 45/M-IND/PER/5/2009 tentang pemberlakuan SNI Kakao Bubuk secara wajib; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67 tahun 2010 tentang Penetapan Barang Ekspor yang dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar; dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15 Tahun 2010 tentang harga patokan ekspor yang dikenakan Bea Keluar.

Draft Permentan tentang Persyaratan Mutu dan Pemasaran Biji Kakao bertujuan meningkatkan produktivitas, mutu, dan pemasaran kakao nasional melalui:

- penanganan pasca panen biji kakao yang baik,
- produksi biji kakao fermentasi secara wajib,
- pengawasan mutu biji kakao yang beredar agar sesuai dengan persyaratan mutu SNI 2323-2008/Amd.1.2010
- fermentasi dan pemasaran biji kakao melalui lembaga Unit Fermentasi dan Pemasaran Biji Kakao (UFPBK), yang pembinaannya





ditangani oleh Dinas tingkat Kabupaten/Kota yang membidangi perkebunan dan mempunyai kewenangan untuk menerbitkan Surat Tanda Pendaftaran (STP-UFPBK).

- pengawasan mutu biji kakao dengan cara sertifikasi menggunakan sistem jaminan mutu dan pengujian produk oleh Otoritas Kompeten Pengamanan Pangan Daerah (OKKP-D), yang mempunyai kewenangan dalam menerbitkan Surat Keterangan Asal Biji Kakao (SKA-BK) oleh UFPBK setiap pengeluaran biji kakao.

Sistem Sertifikasi Kakao Indonesia Berkelanjutan (*Indonesian Sustainability for Cocoa/ISCocoa*) adalah sistem sertifikasi yang menggunakan pendekatan berbasis risiko serta perbaikan secara terus menerus (berkesinambungan). Sistem ini dirancang untuk mengapresiasi perubahan-perubahan yang dilakukan oleh pihak yang disertifikasi, untuk meningkatkan dampak positif dari praktek berkelanjutan dalam sistem produksi, dengan mengacu kepada standard internasional dan nasional yang berlaku.

Tujuan sertifikasi tersebut adalah:

- Meningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditas kakao
- Meningkatkan produksi, produktivitas, dan mutu kakao
- Meminimalisasi kerusakan lingkungan
- Meminimalisasi dampak negatif terhadap kondisi sosial
- Menegakkan sarana perdagangan yang berkeadilan

Proses sertifikasi ini melibatkan pelaku usaha di sektor kakao, lembaga sertifikasi *ISCocoa* yang sudah diverifikasi oleh Komite





*ISCocoa*, dan tim verifikator yang bertugas mengaudit kecukupan dokumen dan melakukan audit lapang yang hasilnya dilaporkan kepada Komite *ISCocoa* untuk dibahas oleh Komisi Teknis.

Berdasarkan presentasi dan diskusi di dalam Lokakarya Kakao Indonesia 2013 di atas, beberapa hal penting yang perlu mendapat perhatian adalah:

1. Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk biji kakao akan segera diusulkan ke Pemerintah untuk diterapkan secara wajib.
2. Pemerintah mendukung investor yang visinya mensejahterakan petani dengan pelaksanaan kegiatan yang berkelanjutan.
3. Pembangunan perkakaoan tetap dilanjutkan oleh pemerintah dan pelaku usaha mengingat kontinuitas ketersediaan biji kakao mutlak diperlukan bagi industri kakao
4. Pengembangan kakao diarahkan dalam bentuk kawasan yang mengintegrasikan *off farm* dan *on farm*
5. Untuk meningkatkan kesejahteraan petani maka perlu adanya kemitraan antara petani dengan pelaku usaha dengan prinsip “win-win benefits”
6. Kerjasama dengan institusi yang handal dalam bidang kakao mulai dari hulu sampai hilir perlu diimplementasikan.







## Kesimpulan dan Penutup

Lokakarya ditutup oleh Ir. Diah Maulida, Deputy Bidang Koordinasi Pangan dan Sumber Daya Hayati Kemenko Bidang Perekonomian dengan kesimpulan sbb:

1. Peningkatan mutu dan produktivitas kakao Indonesia perlu menjadi perhatian bersama
2. Untuk menghasilkan bahan baku yang berkualitas, fermentasi perlu menjadi perhatian bersama agar nilai tambah diperoleh oleh petani dan industri
3. Penguatan kelembagaan petani perlu ditingkatkan
4. Diperlukan dukungan dari berbagai pihak dalam mengangkat perkakaoan Indonesia
5. Anggaran pemerintah daerah (APBD) perlu ditingkatkan dalam menunjang pengembangan perkakaoan Indonesia
6. Perlu pemantauan (monitoring) terus menerus terhadap konsumsi dan produksi kakao dunia
7. Sistem pengelolaan kakao berkelanjutan perlu diwujudkan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani
8. *ISCocoa* perlu segera difinalkan dan disahkan oleh Menteri Pertanian
9. Bursa berjangka perlu dimanfaatkan untuk kemudahan akses pasar dan stabilitas harga komoditas kakao
10. GERNAS Kakao perlu dilanjutkan
11. Infrastruktur yang relevan dengan pembangunan perkakaoan perlu diperbaiki





12. Konektivitas perlu diwujudkan dalam setiap rantai *supply*
13. Pembangunan IPTEK dan SDM harus menjadi prioritas untuk mengangkat perkakaoan Indonesia

## Lampiran

1. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 3470/Kpts/PD.320/10/2012
2. Surat Keputusan Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Sumber Daya Hayati, Kemenko Bidang Perekonomian Nomor KEP-23/D.II.M.EKON/09/2012.
3. Daftar Hadir Peserta Lokakarya
4. Agenda Lokakarya
5. Makalah Presentasi Lokakarya

**Jakarta, 18 November 2013**

**Ketua/Penanggungjawab Lokakarya**

**Dr. Soetanto Abdoellah**

**Ketua Umum Dewan Kakao Indonesia**

